

**PERAN DAN KEWENANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DALAM PENGENDALIAN  
EKSPLOITASI PENAMBANGAN PASIR LIAR PERSPEKTIF FIQH  
SIYASAH**

**(Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh:**

**M. PRABOWO WICAKSONO**

**NPM. 1621020313**

**Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'iyah)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H/20201**

**PERAN DAN KEWENANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DALAM PENGENDALIAN  
EKSPLOITASI PENAMBANGAN PASIR LIAR PERSPEKTIF  
FIQH SIYASAH**  
(Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur)

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**M. PRABOWO WICAKSONO**  
**NPM 1621020313**

**Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**

Pembimbing I : Dr. H. Jayusman, M.Ag  
Pembimbing II : Hasanuddin Muhammad, MH

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H/2021**

## ABSTRAK

Penambangan adalah kegiatan, teknologi dan bisnis yang berkaitan dengan industri pertambangan mulai dari prospeksi, eksplorasi, evaluasi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan sampai pemasaran. Penambangan pasir atau yang lazim disebut dengan penambangan galian C merupakan kegiatan usaha penambangan rakyat yang harus memiliki izin pertambangan rakyat (IPR) hal ini tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur No. 05 tahun 2000 Tentang Pajak Pengambilan Dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan “C”.

Tetapi didalam praktiknya masih banyak sekali praktik-praktik penambangan pasir liar dan melakukan eksploitasi secara berlebihan di Kabupaten Lampung Timur khususnya di kecamatan Pasir Sakti yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan ekosistemnya karena tidak memakai prosedur pertambangan yang sudah dibuat oleh pemerintah berawal dari tahun 2008 hingga saat ini, dan luas wilayah penambangan pasir sudah mencapai 250 hektar lebih lokasi galian tambang pasir yang berdampak bagi masyarakat Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur.

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang di ajukan dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah peran dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur dalam pengendalian eksploitasi penambangan pasir liar?, Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap peran dan kewenangan dinas lingkungan hidup kabupaten Lampung Timur dalam pengendalian eksploitasi penambangan pasir liar?

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan, penelitian ini di lakukan melalui teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang di peroleh dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur dan Masyarakat yang terdampak di sekitar lokasi pertambangan pasir yang ada di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur.

Pertambangan galian pasir golongan C di Kecamatan Pasir Sakti berjalan dengan tidak memiliki izin dari pemerintah daerah yang menyebabkan timbulnya dampak negatif bagi masyarakat yang terdampak maupun ekosistem lingkungan dan dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur belum maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Tinjauan fiqh siyasah mengenai peran dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur adalah belum sesuai dengan prinsip atau aturan yang ada di dalam fiqh siyasah.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Prabowo Wicaksono  
NPM : 1621020313  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Skripsi dengan judul **“Peran Dan Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur Dalam Pengendalian Eksploitasi Penambangan Pasir Liar Perspektif Fiqh Siyasah (studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 6 Januari 2021  
Penulis,

M. Prabowo Wicaksono  
NPM. 1621020313





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukaramo Bandar Lampung Telp. (0721)703260**

**PERSETUJUAN**

**Judul : PERAN DAN KEWENANGAN DINAS LINGKUNGAN  
HIDUP KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DALAM  
PENGENDALIAN EKSPLOITASI PENAMBANGAN PASIR  
LIAR PERSPEKTIF FIQH SIYASAH(studi pada Dinas  
Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur)**

**Nama : M. PRABOWO WICAKSONO  
NPM : 1621020313  
Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)  
Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah  
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. H. Jayusman, M.Ag  
NIP. 197411062000031002**

**Hasanuddin Muhammad, MH  
NIP. 199111172019031018**

**Ketua Jurusan**

**Frenki, M.Si.  
NIP. 198003152009011017**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703260**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Peran dan Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur Dalam pengendalian eksploitasi penambangan pasir liar perspektif fiqh siyasah** (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur) Oleh **M. Prabowo Wicaksono NPM 1621020313** Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah), telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin, 8 Februari Juli 2021**

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua : Frenki, M.Si.** (.....)

**Sekretaris : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.I.** (.....)

**Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H.** (.....)

**Penguji II : Dr. H. Jayusman, M,Ag.** (.....)

**Penguji III : Hasanuddin Muhammad. MH.** (.....)

**Dekan Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

**Dr. H. Khairuddin, M.H.  
NIP. 196210221993031002**



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrahim*

Segala puji bagi Allah SWT Dzat Yang Maha Pengasih lagi Maha penyayang, yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi yang berjudul “Peran Dan Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur Dalam Mencegah Eksploitasi Penambangan Pasir Liar Ditinjau Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur)” dapat terselesaikan. Shalawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya pada zaman Jahiliyyah menuju zaman Islamiyyah dan kita sebagai umatnya mendapatkan syafa’at kelak.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis telah menerima banyak bimbingan, bantuan, nasihat, motivasi, serta kemudahan. Skripsi ini tidak akan selesai tepat waktu tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan banyak kontribusi dan perannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu penulis sampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang selalu tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Frenki, M.Si. Selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) yang telah memfasilitasi segala kepentingan mahasiswa.
4. Bapak Dr. H. Jayusman, M.Ag. Dan bapak Hasanuddin Muhammad. MH. masing-masing selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu disela-sela kesibukan, serta memberikan bimbingan, arahan dan motivasi penulis sehingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk di bangku kuliah hingga selesai.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Akhirnya dengan keyakinan niat tulus ikhlas dan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu siyasah.

Bandar Lampung 6 Januari 2021  
Penulis

**M. Prabowo Wicaksono**  
**NPM. 1621020313**



## **RIWAYAT HIDUP**

M. Prabowo Wicaksono, Lahir pada tanggal 25 September 1997 di Pelindung Jaya, sebagai anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Umar Afandi dan Ibu Siti Maymunah Adapun riwayat pendidikan penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak Aisiyah Bustanul Alfal, selama tahun 2002-2004, SD Negeri 1 Waymili, selama tahun 2004-2010, SMP Negeri 1 Gunung Pelindung, selama tahun 2010-2013, SMA Negeri 1 Pasir Sakti, selama tahun 2013-2016, UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah) tahun 2016.

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah penulis menyusun Skripsi dengan judul "Peran Dan Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur Dalam Pengendalian Eksploitasi Penambangan Pasir Liar Ditinjau Dalam Perspektif Fiqh Siyasah.".

Bandar Lampung, 6 Januari  
2021

Yang membuat,

M. Prabowo Wicaksono  
1621020313

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur dari lubuk hati yang paling dalam, kupersembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua saya tercinta yakni,

1. Ayahanda Umar Afandi dan Ibunda Siti Maymunah yang dengan tulus ikhlas merelakan separuh kehidupannya untuk merawat dan mendidik saya, selalu memberikan doa dan kasih sayang serta motivasi selama ini.
2. Adik-adik saya tercinta Dinda Anisa Febriana, Nazalul Alvin dan Bilqis Thalita Zahra yang selalu memberikan semangat dan dukungannya.
3. Teman seperjuangan Siyasah E wabilkhusus saudara Sofwan Asfa, Epri Setiyawan, Nuzul aji kuncoro, Royis safrindo, Bagus umam yang membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini dan sahabat sahabat yang lainnya tentunya tidak dapat disebutkan satupersatu dalam ukiran tinta hitam ini yang telah memberikan pengalaman, motivasi dan banyak kenangan, untuk semuanya semoga selalu dilancarkan segala urusannya.
4. Kelompok 157 KKN Pulau Panggung yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta yang mengajarkan arti kekompakan dan kebersamaan.
5. Teman-teman dan sahabat yang sudah seperti saudara di bumi rantau perjuangan selalu ada dalam setiap waktu dan yang tak segan memberikan kritik sekaligus saran selama penulis menempuh pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
6. Almamater UIN Raden Intan Lampung yang saya banggakan.

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ  
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”

(Q.S An-Nisa:58)





## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
HALAMAN TABEL .....	xiii
HALAMAN LAMPIRAN.....	xiv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Fokus Penelitian .....	7
E. Rumusan Masalah.....	8
F. Tujuan Penelitian.....	8
G. Signifikansi Penelitian.....	9
H. Metode penelitian .....	10

### BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori.....	16
1. .Pengertian Fiqh Siyasah.....	16
2. .Ruang Lingkup Fiqh Siyasah.....	23
3. .Prinsip Fiqh Siyasah .....	28
4. Nilai-nilai Dasar Fiqh Siyasah .....	29
5. .M Peran dan Kewenangan Pemerintah Daerah Perspektif Fiqh Siyasah .....	33
a. Kebijakan Pemerintah dalam Islam Dalam Pelestarian	

Lingkungan .....	34
b. Sanksi Atas Pelanggarannya dalam Islam.....	39
6. Penambangan pasir liar .....	42
a. Penambangan pasir secara tradisional .....	44
b. Penambangan pasir secara modern.....	45
7. Dinas Lingkungan Hidup .....	55
B. Tinjauan Pustaka.....	55

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Sejarah Singkat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur .....	62
B. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur .....	63
C. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup .....	67
D. Visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur .....	72
E. Peran dan Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur di dalam Pengendalian Eksploitasi Penambangan Pasir Liar.....	73

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Peran dan Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Eksploitasi Penambangan Pasir Liar di Kabupaten Lampung Timur .....	81
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran dan Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Eksploitasi Penambangan Pasir Liar di Kabupaten Lampung Timur .....	85

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 95

B. Rekomendasi ..... 96

**Daftar Pustaka ..... 98**

**Lampiran ..... 99**





## DAFTAR TABEL

Halaman

<b>Table 1</b> Daftar struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur .....	101
---	-----





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung didalamnya agar tidak terjadi kesalahan dan kerancuan perspektif dalam memahami sekripsi ini.

Sekripsi ini berjudul Peran dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian eksploitasi penambangan pasir liar perspektif fiqh siyasah (studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur), maka perlu ditemukan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan kesalah pahaman dalam memberikan pengertian bagi para pembaca sebagai berikut:

1. Peran dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian eksploitasi penambangan pasir liar dapat diartikan sebagai keikutsertaan dan hak Dinas Lingkungan Hidup dalam mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan berupa penambangan pasir yang tidak memiliki izin (ilegal).
2. Perspektif Fiqh Siyasah adalah sistem dalam aspek hukum Islam dalam persepsi visual, cara bagaimana objek terlihat pada mata manusia



Berdasarkan sifat spasial, atau dimensinya dan posisi mata relatif terhadap objek yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>1</sup>

Berdasarkan yang telah diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa penelitian ini adalah sebuah upaya dalam mengungkapkan secara tajam dan kritis mengenai Peran dan Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Dalam pengendalian Eksploitasi Penambangan Pasir Liar Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur).

## **B. Alasan Memilih Judul**

### **1. Alasan Objektif**

Penambangan pasir adalah bagian kegiatan usaha pertambangan non logam atau penggalian dibawah permukaan tanah baik di lahan ataupun di bawah permukaan tanah aliran sungai dengan maksud pengambilan jenis bahan galian mineral non logam (pasir) yang mempunyai arti ekonomis. Pada prinsipnya penambangan pasir secara liar memang tidak dibenarkan, tetapi di dalam praktiknya di Lampung Timur masih banyak sekali praktik-praktik penambangan pasir liar khususnya di Kecamatan Pasir Sakti, sehingga diperlukannya peran dan kewenangan pemerintah daerah di dalam pengendalian penambangan pasir liar tersebut. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan

---

<sup>1</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konseptual Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.4

penelitian terkait peran dan kewenangan pemerinatah daerah di dalam pengendalian penambangan pasir liar tersebut.

## 2. Alasan Subjektif

- a. Permasalahan yang dibahas dalam sekripsi ini adalah termasuk salah satu bidang studi ilmu penulis tekuni di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
- b. Literatur cukup tersedia dan mendukung sehingga diharapkan dalam penulisan dapat diselesaikan serta lokasi tempat penelitian sangat mudah untuk dijangkau oleh peneliti.

## C. Latar Belakang

Penambangan adalah kegiatan, teknologi dan bisnis yang berkaitan dengan industri pertambangan mulai dari prospeksi, eksplorasi, evaluasi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan sampai pemasaran. Penambangan pasir atau yang lazim disebut dengan penambangan galian C merupakan kegiatan usaha penambangan rakyat yang harus memiliki izin pertambangan rakyat (IPR) hal ini tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur No. 05 Tahun 2000 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan "C", Pasal 4 Ayat 2 menyatakan Pemilik atau pengusaha bahan galian golongan "C" wajib memiliki izin penambangan bahan galian golongan "C", dari Kepala Daerah, dan dijelaskan pada undang-undang tersebut bahwa yang disebut bahan galian

golongan “C” pada Pasal 2 Ayat 3 Huruf W adalah pasir dan krikil dan Huruf X adalah pasir kuarsa.<sup>2</sup>

Izin pertambangan rakyat merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah usaha pertambangan yang merupakan usaha untuk melakukan kegiatan eksploitasi, eksplorasi, produksi, pemurnian, dan penjualan. Usaha pertambangan itu dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang bersahaja namun tidak menggunakan teknologi canggih, sebagaimana halnya dengan perusahaan pertambangan yang mempunyai modal yang besar dan menggunakan teknologi canggih. Kegiatan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi secara terbatas.<sup>3</sup>

Pasir adalah contoh bahan mineral butiran. Butiran pasir umumnya berukuran antara 0,0625 sampai 2 milimeter. Materi pembentuk pasir adalah silikon dioksida tetapi di beberapa pantai tropis dan subtropis umumnya dibentuk dari batu kapur. Pasir memiliki warna sesuai dengan asal pembentukannya. Pasir juga penting untuk bahan bangunan bila dicampur dengan semen.<sup>4</sup> Penambangan pasir yang dimaksud adalah menambang dengan menggali (mengambil) barang tambang dari tanah atau penambangan pasir yang merupakan kegiatan dalam rangka upaya

---

<sup>2</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur No. 05 Tahun 2000 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan “C”.

<sup>3</sup> Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.89

<sup>4</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: CV. Widya Karya, 2009), h.362



pencarian, penambangan, pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi dan migas).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan pengendalian terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.<sup>5</sup>

Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur yang tertuang di dalam Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 61 Tahun 2019 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur oleh karenanya dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur sebagai lembaga teknis daerah sangat berperan penting dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang lingkungan hidup sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat akan peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian eksploitasi penambangan pasir liar, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan di daerah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup sebagai instansi dibawah naungan pemerintah daerah memiliki tugas dan peranan penting untuk mengawasi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengelolaan limbah di Kabupaten Lampung Timur. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir dampak buruknya pengelolaan lingkungan yang dikelola oleh entitas bisnis.<sup>6</sup>

Pada prinsipnya aturan yang telah dibuat pemerintah daerah harus kita taati dan penambangan pasir secara liar memang tidak dibenarkan, tetapi di dalam praktiknya masih banyak sekali praktik-praktik penambangan pasir liar dan melakukan eksploitasi secara berlebihan di Kabupaten Lampung Timur khususnya di Kecamatan Pasir Sakti berawal dari tahun 2008 hingga saat ini, dan luas wilayah penambangan pasir sudah mencapai 250 hektar lebih lokasi tambang pasir.<sup>7</sup> Tentunya jumlah yang sangat luas itu mempunyai sebuah dampak selain memajukan kemakmuran desa, hal ini juga sangat meresahkan masyarakat sekitar lokasi pertambangan dan juga menyebabkan jalan rusak yang diakibatkan dari kelongsoran tanah akibat penambangan yang sewenang-wenang hingga tidak memperhatikan batasan wilayah pemukiman penduduk, sehingga diperlukannya peran dan kewenangan Pemerintah Daerah Dinas Lingkungan Hidup didalam pengendalian penambangan pasir liar tersebut.

---

<sup>6</sup> Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 61 Tahun 2019 tentang kedudukan susunan organisasi.

<sup>7</sup> Lokasi Galian Tambang Pasir Ilegal Di Lampung Timur Tersebar Di Empat Kecamatan” (on-line), tersedia di: <http://Kupastuntas.co> (15 juli 2020)

Dalam Islam telah diatur bahwa kita bukan hanya mematuhi aturan-aturan hukum yang telah Allah dan Rasul tetapkan. Tetapi, kita juga harus mematuhi aturan pemerintah dan pemimpin yang biasa disebut dengan Ulil Amri. Apabila menyalahi aturan yang telah ditentukan dari suatu pemimpin maka hal tersebut jelas telah melalaikan yang telah Allah tetapkan. Hal ini sesuai dengan Surat An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.(QS. An-Nisa:59)

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah melalui penelitian dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk proposal skripsi, untuk itu maka penulis memilih judul: “Peran dan Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Eksploitasi Penambangan pasir liar perspektif fiqh siyasah(Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur)”

#### **D. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian juga merupakan batas ruang dalam penelitian agar penelitian yang dilakukan tidak sia-sia karena ketidakjelasan dalam pengembangan pembahasan.

Dengan demikian yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah mengenai bagaimana Peran Dan Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Eksploitasi Penambangan Pasir Liar dalam Perspektif Fiqh Siyasah.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah disebutkan diatas, Maka dapat ditemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur dalam pengendalian eksploitasi penambangan pasir liar?
2. Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap peran dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur dalam pengendalian eksploitasi penambangan pasir liar?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan tujuan penelitian agar dapat memahami maksud tujuan dari penelitian ini, tujuan penelitian di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Lampung Timur dalam pengendalian eksploitasi penambangan pasir liar di Kabupaten Lampung Timur

2. Untuk mengetahui perspektif fiqh siyasah terhadap peran dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur dalam pengendalian eksploitasi penambangan pasir liar.

#### **G. Signifikansi Penelitian**

Dalam penelitian ini tentunya diharapkan dapat memberi manfaat bagi pembaca, adapun diantara lain manfaat penelitian ini yang dapat diberikan:

##### **a. Manfaat Teoritis**

1. Hasil penelitian diharapkan sebagai referensi dan informasi di Fakultas Syari'ah sebagai sumbangsih pemikiran yang positif serta memberikan konstibusi untuk ilmu pengetahuan hukum, agar tetap hidup dan berkembang khususnya tentang Peran dan Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur dalam Pengendalian Eksploitasi Penambangan Pasir Liar ditinjau dari aspek Dinas Lingkungan Hidup dalam Perspektif Fiqh Siyasah.
2. Membantu menyumbangkan karya pemikiran mengenai Peran dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur dalam pengendalian eksploitasi penambangan pasir liar perspektif fiqh siyasah.

##### **b. Manfaat Praktis**

1. Memberikan manfaat bagi semua kalangan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu hukum ketatanegaraan disetiap perguruan tinggi Fakultas Syari'ah.



2. Untuk diajukan sebagai syarat wajib bagi mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis).<sup>8</sup> Metode penelitian adalah salah satu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh pemecahan terhadap masalah.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.<sup>10</sup> Penelitian ini dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lapangan yang berupa wawancara (*interview*) untuk mendapatkan informasi terhadap peran dan kewenangan Dinas

---

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2004), h.57

<sup>9</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), h.2

<sup>10</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial*, (Bandung: Alumni, 1986), h.33

Lingkungan Hidup dalam pengendalian eksploitasi penambangan pasir liar di Kabupaten Lampung Timur.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis. Deskriptif Analitis adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objek mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada didalam fenomena tertentu.<sup>11</sup> Dengan pendekatan kualitatif dan data yang diperoleh langsung dari penelitian yang berkaitan dengan peran dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian eksploitasi penambangan pasir liar di Kabupaten Lampung Timur.

2. Sumber Data

Untuk membahas permasalahan-permasalahan yang diungkapkan dalam penelitian ini, diperlukan adanya data yang tersedia dari:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian yaitu peneliti terjun langsung kelapangan guna melakukan hasil observasi, wawancara serta dokumentasi.<sup>12</sup> Dalam hal ini data primer diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup

---

<sup>11</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1985), h. 29

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 28

Kabupaten Lampung Timur. Jadi data primer penelitian ini berupa hasil observasi, hasil wawancara, serta hasil dokumentasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bahannya didapat dari penelitian kepustakaan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan atau literature buku-buku, jurnal, skripsi, dan media yang berkaitan dengan masalah penelitian.<sup>13</sup>

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan komponen yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian. Kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data.<sup>14</sup> Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilanjutkan.<sup>15</sup> Jadi observasi yaitu pengumpulan data dengan cara cermat dan sistematis. Dengan demikian observasi yang dilakukan akan diteliti dan dapat melihat secara kondisi di lapangan (Kabupaten Lampung Timur Kecamatan

---

<sup>13</sup> Amirudin dan Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h.30

<sup>14</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Al-fabeta, 2010), h.137

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 62

Pasir Sakti), serta mencatat kegiatan atau situasi yang diteliti di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden di lapangan (lokasi).<sup>16</sup> Dengan cara tanya jawab secara lisan maupun tulisan dan bertatap muka secara langsung dengan narasumber dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam, wawancara dilakukan dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur dan beberapa masyarakat yang ada di Kecamatan Pasir Sakti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan jalan melihat, membaca, mempelajari, kemudian mencatat data yang sudah ada hubungannya dengan objek penelitian.<sup>17</sup>

4. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan tertentu. Data yang telah dikumpulkan diolah, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> *Ibid*, h.86

<sup>17</sup> Sri Murniati dan Dwi Kasasih, “Analisis Kontribusi dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang”, Jurnal Kompetitif, Vol.6 No.1. Januari-Juli 2017, diakses pada tanggal 27 Februari 2020. h. 95

- a. Editing, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.<sup>18</sup> Mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah.<sup>19</sup>
- b. Koding, yaitu mengklarifikasikan jawaban-jawaban dari para responden ke dalam kategori, atau memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data atau urutan sumber masalah.
- c. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur berurutan dan sistematis.
- d. Sistematis data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah.<sup>20</sup>

## 5. Metode Analisis Data

Dalam hal ini setelah peneliti melakukan data baik dari lapangan maupun pustaka maka selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami fenomena yang terjadi terkait dengan peran dan kewenangan pemerintah daerah dalam pengendalian eksploitasi penambangan pasir liar.

---

<sup>18</sup> Susiadi, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h.15

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 126

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 129



Metode berfikir dalam penelitian ini adalah dengan cara berfikir deduktif. Metode deduktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang umum untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih khusus mengenai fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan dengan membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan peran dan kewenangan pemerintah daerah dalam pengendalian eksploitasi penambangan pasir liar.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan di atas, hasil penelitian tentang peran dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur dalam pengendalian eksploitasi penambangan pasir liar perspektif fiqh siyasah (studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur). Maka penulis menyimpulkan beberapa hal di antaranya:

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan peraturan Bupati Nomor 61 tahun 2019 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur mempunyai tugas pokok dan memiliki peranan melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantu. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur belum maksimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Pertambangan yang ada di Kecamatan Pasir Sakti hingga saat ini masih ada yang beroperasi tanpa adanya izin dari pemerintah daerah, dan hal ini menyebabkan banyaknya dampak negatif yang merugikan bagi masyarakat, rusaknya lingkungan hidup dan belum ada upaya pemulihan terhadap lokasi galian yang sudah

digali. Serta dalam hal ini pemilik lokasi pertambangan pasir tidak mematuhi aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah.

2. Perspektif fiqh siyasah terhadap peran dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur dalam penanggulangan eksploitasi penambangan pasir liar belum berjalan secara maksimal sesuai aturan fiqh siyasah. Penambangan yang ada di Kecamatan Pasir Sakti masih berjalan dengan tidak adanya izin dari pemerintah daerah dan berjalan tidak memperhatikan dampak lingkungan artinya disini pihak dari Dinas Lingkungan Hidup kurang melakukan pengawasan dan pemantauan sesuai tugas dan fungsinya terhadap lokasi galian pertambangan yang ada di Kecamatan Pasir Sakti, serta pemilik lokasi galian pertambangan tidak mentaati aturan dan prosedur dalam pertambangan yang sudah di tentukan oleh pemerintah daerah.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan informasi-informasi yang penulis dapatkan pada saat pengumpulan data serta hasil dari analisis penelitian, berikut ini adalah rekomendasi yang dapat penulis berikan:

1. Diharapkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur untuk lebih memaksimalkan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan Bupati Kabupaten Lampung Timur Nomor 61 Tahun 2019 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung

Timur dalam mengendalikan eksploitasi penambangan pasir liar di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur.

2. Diharapkan kepada pemilik lokasi galian pertambangan yang ada di Kecamatan Pasir Sakti untuk mematuhi peraturan dan prosedur dalam kegiatan pertambangan yang telah di buat oleh pemerintah daerah.



## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku:

- Ana Retnoningsih Suharso dan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: CV. Widya Karya, 2009.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Hadi Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1973.
- Hoertomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Mitra Pelajar.
- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Konseptual Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Kartono Kartini, *Pengantar Metode Riset Sosial*, Bandung: Alumni, 1986.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1985.
- M Hadjon Philiipus, *Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2004.
- Muhammd Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung: Angkasa, 1987.
- Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Subagyo Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Al-fabeta, 2010.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan praktiknya* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.
- Susiadi, *Metode Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.



Zainal Abidin dan Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Dwi Kasasih dan Sri Murniati, “Analisis Kontribusi dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pelembang”, *Jurnal Kompetitif*, Vol.6 No.1. Januari-Juli 2017, diakses pada tanggal 27 Februari 2020.

Pengertian Eksploitasi (On-line) tersedia di <https://www.maxmanroe.com> (29 Februari 2020)

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Bupati No.61 Tahun 20019 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur.

Peraturan daerah Kabupaten Lampung Timur No.05 Tahun 2000 Tentang Pajak Pengambilan Dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C.